



BADAN KEBIJAKAN FISKAL  
KEMENTERIAN KEUANGAN RI

# Strategi Kemenkeu dalam Upaya Pembenahan dan Peningkatan Penerimaan Negara dari PNBP dan Cukai

Webinar “Peningkatan Penerimaan Negara Melalui Fokus Aksi Keuangan Negara”  
3 Mei 2021

Pusat Kebijakan Pendapatan Negara  
Badan Kebijakan Fiskal

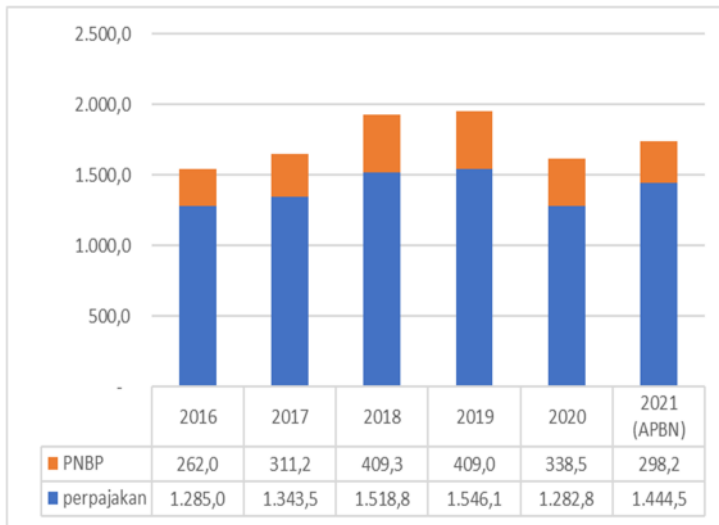
# Outline

- ❑ Perkembangan PNBPN 2016 - 2021
- ❑ Komponen PNBPN 2016 - 2021
- ❑ PNBPN KL Terbesar
- ❑ Kebijakan Optimalisasi PNBPN dalam APBN 2021
- ❑ Perkembangan Penerimaan Cukai 2016 -2021
- ❑ Kebijakan Optimalisasi Cukai dalam APBN 2021



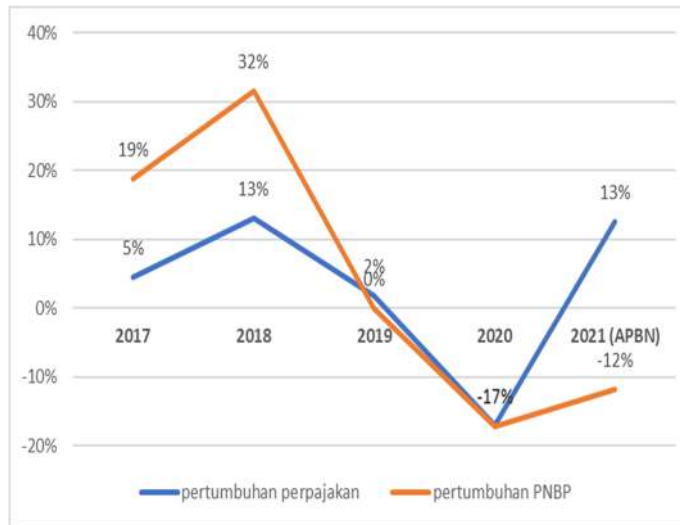
# Perkembangan PNBPN 2016 - 2021

PNBP sebagaimana penerimaan perpajakan meningkat tiap tahun, kecuali tahun 2020 akibat adanya covid 19



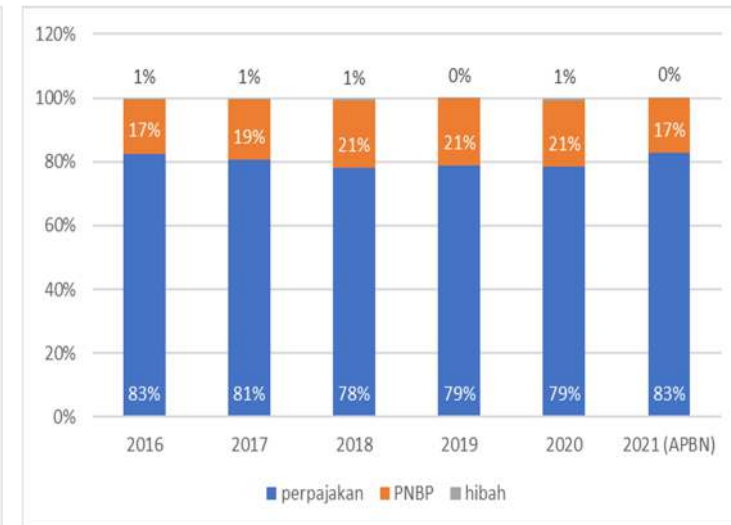
Catatan:  
Penerimaan dalam triliun. Realisasi 2020 bersifat sementara.  
Sumber: Kementerian Keuangan, diolah

Dibandingkan perpajakan, PNBPN tumbuh lebih tinggi pada 2017-2018, namun berikutnya lebih rendah



Catatan:  
Pertumbuhan 2020 menggunakan realisasi sementara 2020  
Sumber: Kementerian Keuangan, diolah

Rasio PNBPN sekitar 17-21 persen, rasio penerimaan perpajakan sekitar 78-83 persen thd pendapatan negara



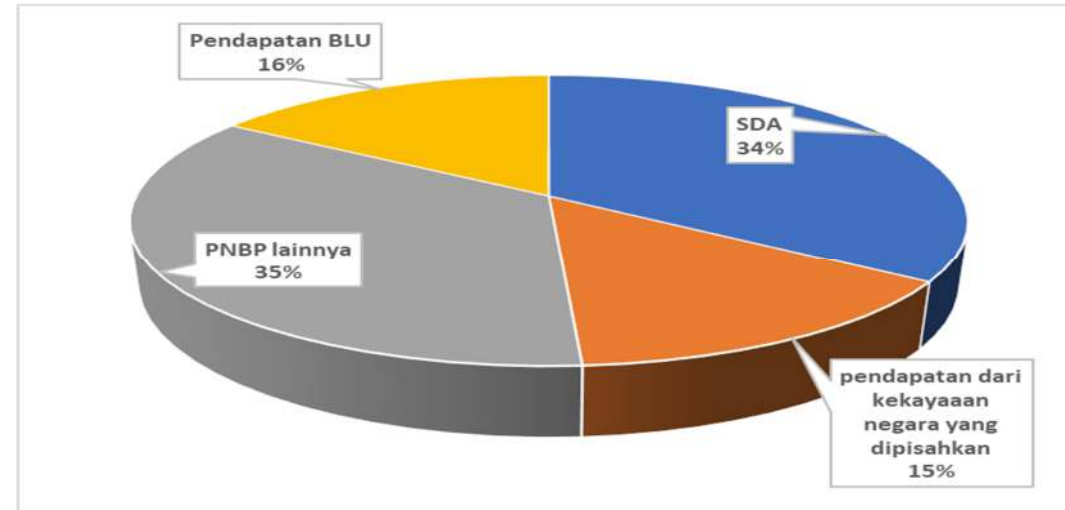
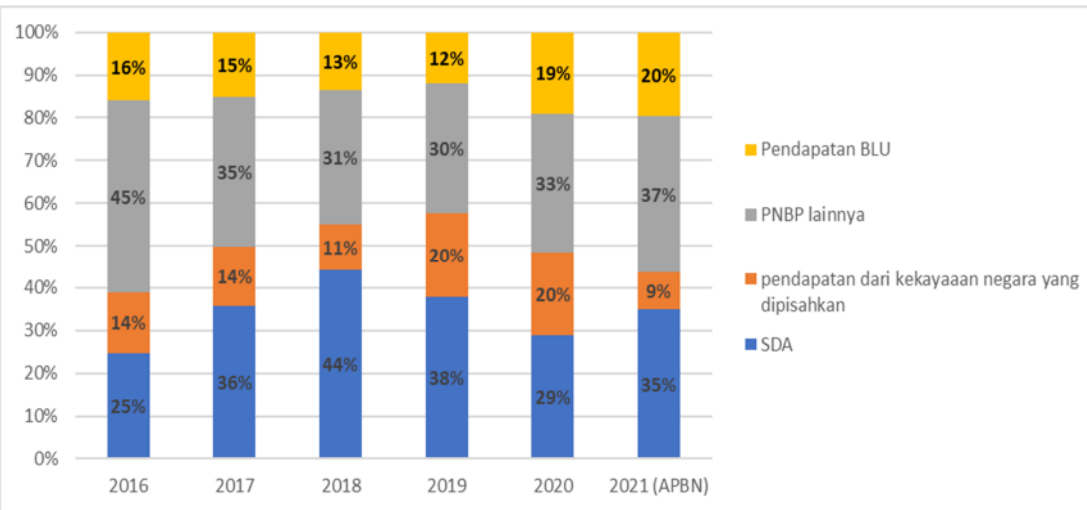
Catatan:  
Rasio 2020 menggunakan realisasi sementara 2020  
Sumber: Kementerian Keuangan, diolah

- PNBPN menyumbang sekitar 17-21 persen dalam pendapatan negara, dengan kontribusi yang cenderung meningkat dalam periode 2016-2020. Dalam APBN 2021, PNBPN ditargetkan lebih rendah dibanding tahun 2020 sehingga kontribusinya diperkirakan turun.
- Pertumbuhan PNBPN 2018-2019 tinggi dipengaruhi tingginya penerimaan SDA.

# Komponen PNBP 2016 - 2021

PNBP terutama disumbang dari penerimaan SDA dan PNBP lainnya

Kontribusi SDA rata-rata sekitar 34%, PNBP lainnya rata-rata sekitar 35%



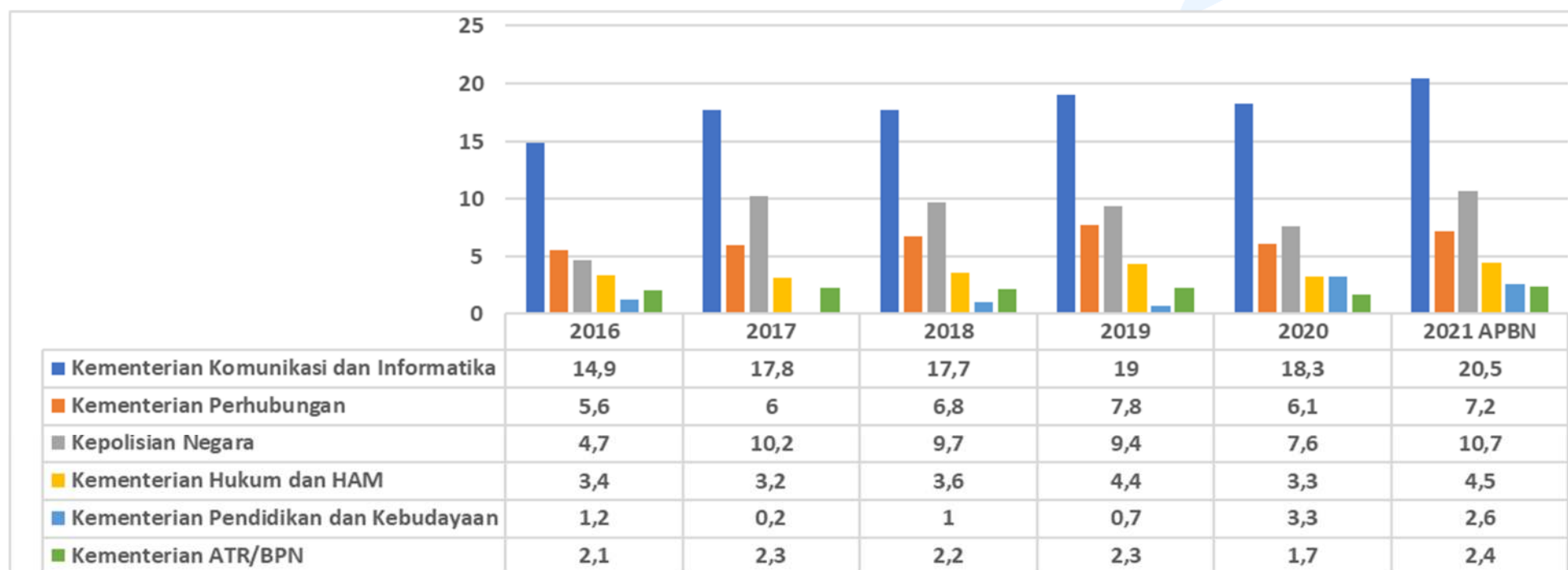
Catatan:  
Rasio 2020 menggunakan realisasi sementara 2020  
Sumber: Kementerian Keuangan, diolah

Catatan:  
Rasio 2020 menggunakan realisasi sementara 2020  
Sumber: Kementerian Keuangan, diolah

- Total PNBP lainnya dan PNBP SDA menyumbang sekitar 70 persen PNBP.
- PNBP SDA dipengaruhi harga komoditas dunia, terutama minyak dan batubara . PNBP lainnya terutama dari PNBP K/L

# 6 PNBK KL Terbesar

Penerimaan PNBK KL terbesar terutama dari Kementerian Komunikasi dan Informatika



Catatan: Penerimaan dalam triliun. Tahun 2020 berdasarkan outlook Perpres 72 / 2020.

Sumber: Kementerian Keuangan, diolah

# Kebijakan Optimalisasi PNBP dalam APBN 2021

- ❑ Secara umum, kebijakan yang dilakukan antara lain:
  - menyempurnakan tata Kelola PNBP termasuk sinergi pengawasan;
  - mendorong peningkatan Iklim Investasi Sektor Hulu Migas dan dukungan harga gas untuk mendukung industri lebih kompetitif;
  - meningkatkan pengelolaan aset lebih produktif dengan penerapan Highest and Best Use (HBU);
  - optimalisasi penerimaan dari dividen BUMN dengan mempertimbangkan aspek kesinambungan dan mitigasi risiko dan efisiensi kinerja BUMN;
  - meningkatkan kualitas layanan PNBP dan pemberian tarif sampai dengan Rp0 atau 0 persen serta keringanan PNBP dalam kondisi tertentu; dan
  - meningkatkan kinerja pelayanan BLU antara lain mengutamakan kualitas pelayanan yang affordable, available, dan sustainable.
- ❑ Dalam upaya mengoptimalkan PNBP, Pemerintah juga mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti kelestarian lingkungan, keberlangsungan dunia usaha, daya beli masyarakat, dan kualitas pelayanan.

# Perkembangan Penerimaan Cukai 2016 -2021

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020 realisasi sementara	2021 APBN
cukai (triliun)	143,5	153,3	159,6	172,4	176,31	180
pertumbuhan		7%	4%	8%	2%	2%
rasio terhadap perpajakan	11%	11%	11%	11%	14%	12%

- Penerimaan cukai selalu meningkat tiap tahun, terakhir tumbuh 2 persen pada tahun 2020. Peningkatan penerimaan cukai antara lain dipengaruhi oleh penyesuaian tarif cukai serta peningkatan pengawasan cukai illegal.
- Penerimaan cukai terutama dari cukai tembakau, lebih dari 95 persen.
- Penerimaan cukai menyumbang sekitar 11-14 persen dari penerimaan perpajakan total.

# Kebijakan Optimalisasi Cukai dalam APBN 2021

- Perluasan basis pajak baru, melalui pengenaan barang kena cukai (BKC) baru seperti cukai produk plastic.
- Penguatan joint program DJP-DJBCDJA.
- Penguatan kerjasama dengan K/L, serta aparat penegak hukum (APH) untuk pengamanan penerimaan negara.
- Penguatan proses pemeriksaan dan pengelolaan penerimaan, serta keberatan dan peningkatan kemenangan sengketa banding.
- Pemberantasan dan penurunan peredaran BKC illegal.





BADAN KEBIJAKAN FISKAL  
KEMENTERIAN KEUANGAN RI

# Terima kasih

Pusat Kebijakan Pendapatan Negara  
Badan Kebijakan Fiskal- Kementerian Keuangan